



# DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110 - <http://www.wantannas.go.id>  
Telepon (021) 3451066, Faksimile (021) 3451066

## INSTRUKSI DEPUTI SISTEM NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2021

### TENTANG

### AKSI REFORMASI BIROKRASI DEPUTI SISTEM NASIONAL SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2021 DAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEPUTI SISTEM NASIONAL,

Agar kinerja Tim Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di lingkungan Deputi Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2021 bisa lebih terpantau dan terukur, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Pembantu Deputi dan Analis Kebijakan di lingkungan Deputi Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; dan  
2. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di lingkungan Deputi Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Untuk :

PERTAMA : Para Pembantu Deputi dan Analis Kebijakan wajib melakukan monitoring, memberi dukungan, dan memfasilitasi Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di lingkungan Deputi Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dalam pelaksanaan aksi reformasi birokrasi Tahun 2021 pada 2 (dua) Komponen Pengungkit yang meliputi Aspek Pemenuhan dan Aspek Reform, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I serta tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Deputi Sistem Nasional ini.

KEDUA : Para Koordinator Kelompok Program beserta Anggota Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di lingkungan Deputi Sistem Nasional senantiasa berkoordinasi dengan Ketua Kelompok Program terkait dari Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dalam melaksanakan aksi reformasi birokrasi di bidang masing – masing.

KETIGA . . .

- KETIGA : Para Koordinator Kelompok Program:
1. Memberikan laporan pelaksanaan aksi reformasi birokrasi secara berkala kepada Ketua melalui Wakil Ketua/Koordinator masing-masing program;
  2. Mendukung Asesor dalam menyusun lembar kerja evaluasi pelaksanaan aksi reformasi birokrasi kemudian diunggah ke Aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi setelah mendapat persetujuan dari Ketua; dan
  3. Membuat laporan tahunan pelaksanaan aksi reformasi birokrasi tahun 2021 sesuai program masing – masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan disampaikan kepada Sekretaris pada akhir bulan November 2021.
- KEEMPAT : Masa kerja aksi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di lingkungan Deputy Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Instruksi Deputy Sistem Nasional ini, dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- KEENAM : Melaksanakan Instruksi Deputy Sistem Nasional ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.
- KETUJUH : Instruksi Deputy Sistem Nasional ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di J a k a r t a  
Pada tanggal **31** Agustus 2021

DEPUTI SISTEM NASIONAL  
SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,



MOH. HATTA USMAR RUKKA

**AKSI REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN DEPUTI SISTEM NASIONAL  
 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2021**

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEBERHASILAN	TARGET	KET
1	2	3	4	5	6
<b>Aspek Pemenuhan</b>					
1.	Tim Reformasi Birokrasi/ Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah dibentuk	Ketua Program Manajemen Perubahan Pok A	Tim Reformasi Birokrasi/ Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah dibentuk	Diterbitkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Deputi Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
2.	Tim Reformasi Birokrasi/ Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja		Tim Reformasi Birokrasi/ Penanggung jawab Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi	a. Diterbitkan Instruksi Deputi Sistem Nasional tentang Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2021	B03, B06, B09, B12

b. Laporan . . .

1	2	3	4	5	6
				b. Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	
3.	Tim Reformasi Birokrasi/ Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti		Tim Reformasi Birokrasi/ Penanggung jawab Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti	a. Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional c. Laporan Tindak Lanjut atas Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03, B06, B09, B12
4.	Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan		Road Map/Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan	Tersusunnya dan diterbitkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2020 – 2024	B03
5.	Telah terdapat sosialisasi/ internalisasi Road Map/ Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja kepada anggota organisasi		Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja kepada anggota organisasi	Dilaksanakannya sosialisasi/ internalisasi <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi kepada seluruh pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03, B06, B09, B12

7. Pelaksanaan . . .

1	2	3	4	5	6
7.	Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku		Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku	a. Diterbitkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Pembentukan Tim Asesor PMPRB Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku	B03, B06, B09, B12
8.	Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB		Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi	Telah mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja PMPRB di Lingkungan Deputi Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B06
9.	Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan		Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan	Disosialisasikan dan dilaksanakan Instruksi Deputi Sistem Nasional tentang Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2021	B03, B06, B09, B12
10.	Penanggungjawab RB internal unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja		Penanggungjawab reformasi birokrasi internal unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja	a. Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03, B06, B09, B12

c. Laporan . . .

1	2	3	4	5	6
				c. Laporan Tindak Lanjut atas Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	
11.	Terdapat keterlibatan pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi		Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi/pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	Seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03, B06, B09, B12
12.	Terdapat upaya untuk menggerakkan unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model		Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi/unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model	a. Diterbitkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang <i>agent of change</i> Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Pelatihan <i>agent of change</i> Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B06, B12
13.	Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/ sinkron/ bersifat menghambat yang akan direvisi/ dihapus	Ketua Pok B Program Deregulasi Kebijakan	Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ sinkron/ bersifat menghambat yang akan direvisi/ dihapus	Laporan evaluasi penguatan perundang-undangan di lingkungan Deputi Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B06, B12
14.	Telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/ tidak sinkron/ bersifat menghambat		Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron/ bersifat menghambat	Disusunnya Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Program Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03

15. Telah . . .

1	2	3	4	5	6
15.	Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi	Ketua Pok C dan Program Penataan Penguatan Organisasi	Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi	Laporan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
16.	Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi		Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi	Laporan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
17.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi		Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi	Laporan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
18.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan		Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan	Laporan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
19.	Telah dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja unit kerja di atasnya		Telah dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja unit organisasi di atasnya	Laporan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
20.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis rentang kendali terhadap struktur yang langsung berada di bawahnya		Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis rentang kendali terhadap struktur yang langsung berada di bawahnya	Laporan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
21.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/ unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan		Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan	Laporan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
22.	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat /kewenangan		Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat /kewenangan lembaga	Laporan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12

23. Telah . . .

1	2	3	4	5	6
23.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan unit kerja lain		Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain	Laporan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
24.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis		Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	Laporan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
25.	Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi		Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
26.	Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi		Hasil evaluasi untuk ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi	Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03, B06, B09, B12
27.	Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis	Ketua Program Penataan Laksana	Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah	Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
28.	Telah tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi		Telah tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	a. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
29.	Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi		Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi	a. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03

1	2	3	4	5	6
				b. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Renstra Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional c. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang IKU Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	
30.	Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan Kinerja Organisasi secara berjenjang		Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan Kinerja Organisasi secara berjenjang	a. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Renstra Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional c. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang IKU Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
31.	Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)		Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)	Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
32.	Telah dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP		Telah dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP	Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03

1	2	3	4	5	6
33.	Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan		Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	a. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Penataan Tata Laksana (business process) di lingkungan Setjen Wantannas c. Laporan Monitoring dan evaluasi Penerapan SOP di Lingkungan Deputi Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03, B06, B12
34.	Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi		Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi	a. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Laporan Monitoring dan evaluasi Penerapan SOP di Lingkungan Deputi Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03, B06, B12
35.	Telah dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi		Telah dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi	a. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Laporan Monitoring dan evaluasi Penerapan SOP di Lingkungan Deputi Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03, B06, B12

36. Adanya . . .

1	2	3	4	5	6
36.	Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik		Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik	Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Tentang Standar Prosedur Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
37.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik		Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Laporan Layanan Informasi Publik	B12
38.	Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja	Ketua Pok Program E Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan	a. Peraturan Sekretaris tentang Penetapan Peringkat Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
39.	Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan		Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan	Peraturan Sekretaris Tentang Penetapan Peringkat Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
40.	Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama		Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama	Peraturan Sekretaris Tentang Penetapan Peringkat Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
41.	Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi		Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai	B03

42. Telah . . .

1	2	3	4	5	6
42.	Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi		Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi	Laporan peningkatan kompetensi SDM	B12
43.	Penerapan Penetapan kinerja individu		Penerapan Penetapan kinerja individu	Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai	B12
44.	Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi		Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Seluruh penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi	B12
45.	Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya		Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya	Seluruh ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya	B12
46.	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik		Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan	B12
47.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu	Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tahunan	B12
48.	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/ pemberian <i>reward and punishment</i> lainnya		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian penghargaan dan sanksi lainnya	Seluruh hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian <i>reward and punishment</i> lainnya	B12
49.	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan		Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan	Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03

1	2	3	4	5	6
50.	Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku		Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	Laporan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Sesjen Wantannas tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
51.	Unit kerja telah mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)		Unit kerja telah mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Peraturan Sekretaris Tentang Penetapan Peringkat Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
52.	Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ		Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ	Peraturan Sekretaris Tentang Penetapan Peringkat Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
53.	Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai		Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai	Pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian	B03
54.	Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	Ketua Pok Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja F	Pimpinan/pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	a. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Rencana Strategis Dewan Ketahanan Nasional tahun 2020 – 2024 b. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang penetapan tim renstra	B03
55.	Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja		Pimpinan/pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	B03
56.	Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala		Pimpinan/pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala	Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	B03

57. Pimpinan . . .

1	2	3	4	5	6
57.	Pimpinan unit kerja telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah		Pimpinan/pimpinan unit kerja telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah	a. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Rencana Strategis Dewan Ketahanan Nasional tahun 2020 – 2024 b. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang penetapan tim renstra	B03
58.	Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun		Pimpinan/pimpinan unit kerja memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun	Pimpinan memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun	B03
59.	Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala		Pimpinan/pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala	Pimpinan menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala	B03
60.	Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja		Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	B03
61.	Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala		Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala	Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan	B03, B06, B09, B12
62.	Telah dilakukan <i>public campaign</i>	Ketua Program Pok G	Telah dilakukan <i>public campaign</i>	<i>Public campaign</i> telah dilakukan secara berkala	B03, B06, B09, B12
63.	Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan	Penguatan Pengawasan	Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan	UPG melaporkan secara berkala tentang praktek gratifikasi	B03, B06, B09, B12
64.	Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi		Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	B03, B06, B09, B12
65.	Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti		Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti	Terdapat laporan tindak lanjut	B03, B06, B09, B12

66. Telah . . .

1	2	3	4	5	6
66.	Telah mengidentifikasi lingkungan pengendalian		Telah mengidentifikasi lingkungan pengendalian	a. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang pedoman teknis penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. b. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentag Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
67.	Telah dilakukan penilaian risiko unit kerja		Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi/unit kerja	Seluruh organisasi telah melakukan penilaian risiko	B03
68.	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Seluruh organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	B03
69.	Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait		SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	B03, B06, B09, B12
70.	Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern		Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern	Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala	B12
71.	Unit kerja telah melakukan evaluasi atas Penerapan SPI		Unit kerja telah melakukan evaluasi atas Penerapan SPI	Seluruh unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta memberikan perbaikan dalam penerapan SPI	B12
72.	Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	B12

81. Telah . . .

1	2	3	4	5	6
73.	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala	B12
74.	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	B12
75.	Whistle Blowing System telah disosialisasikan		Whistle Blowing System telah disosialisasikan	Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh organisasi	B03, B06, B09, B12
76.	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan		Penanganan Benturan Kepentingan telah	Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke seluruh unit organisasi	B03, B06, B09, B12
77.	Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan		Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Laporan pelaksanaan, monitoring, dan tindak lanjut penanganan benturan kepentingan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
78.	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan		Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Laporan pelaksanaan, monitoring, dan tindak lanjut penanganan benturan kepentingan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
79.	Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti		Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	Laporan pelaksanaan, monitoring, dan tindak lanjut penanganan benturan kepentingan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
80.	Telah dilakukan penancangan Pembangunan zona integritas level unit kerja		Telah dilakukan penancangan zona integritas	Keputusan Sesjen Wantannas Tentang Penetapan Calon Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03

81. Telah . . .

1	2	3	4	5	6
81.	Telah dilakukan pembangunan zona integritas		Telah dilakukan pembangunan zona integritas	a. Keputusan Sesjen Wantannas Tentang Penetapan Calon Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Instruksi Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Rencana Aksi ZI Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
82.	Telah dilakukan evaluasi atas pembangunan zona integritas		Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan	a. Keputusan Sesjen Wantannas Tentang Pembentukan TPI ZI b. Keputusan Sesjen Wantannas Tentang Penetapan Calon Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional c. Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Zona Integritas di Lingkungan Setjen Wantannas	B03
83.	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Ketua Pok Program H Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang standard pelayanan unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
84.	Standar pelayanan telah dimaklumkan		Standar pelayanan telah dimaklumkan	Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di <i>website</i>	B03

85. Dilakukan . . .

1	2	3	4	5	6
85.	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan		Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan <i>stakeholders</i> (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat	B12
86.	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima		Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan	B03, B06, B09, B12
87.	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media		Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara <i>online</i> ( <i>website</i> /media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional	B03, B06, B09, B12
88.	Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan		Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan	Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Sistem Penghargaan dan Sanksi ( <i>Reward and Punishment</i> ) Bagi Pelaksana Layanan dan Kompensasi Bagi Penerima Layanan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03

89. Telah . . .

1	2	3	4	5	6
89.	Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar		Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Sistem Penghargaan dan Sanksi ( <i>Reward and Punishment</i> ) Bagi Pelaksana Layanan dan Kompensasi Bagi Penerima Layanan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
90.	Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi		Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras	B03, B06, B09, B12
91.	Telah terdapat inovasi pelayanan		Terdapat inovasi pelayanan	Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional dan telah direplikasi oleh instansi lain	B03, B06, B09, B12
92.	Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan		Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan	Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!	B03, B06, B09, B12
93.	Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan		Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan	Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang tim koordinasi pengelolaan layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (LAPOR) sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N) Setjen Wantannas	B03
94.	Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan		Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	B12

95. Telah . . .

1	2	3	4	5	6
95.	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/ masukan dan konsultasi	Laporan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan konsultasi secara berkala	B12
96.	Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan		Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 1 kali dalam setahun	B12
97.	Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka		Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online (website, media sosial, dll) dan offline	B12
98.	Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat		Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	Laporan Tindak Lanjut IKM	B12
99.	Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan		Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan	B03, B06, B09, B12
100.	Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus		Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	Laporan Kegiatan Pengelolaan Sisfo Upgrade Pemeliharaan dan Update Sistem	B12
<b>Aspek Reform</b>					
1.	Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi	Ketua Pok Program A Manajemen Perubahan	Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi	a. Diterbitkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang <i>agent of change</i> Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Pelatihan <i>agent of change</i> Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional c. Keputusan Sesjen Wantannas Tentang Pembentukan TPI ZI	B03, B06, B09, B12

d. Tersusunnya . . .

1	2	3	4	5	6
				d. Tersusunnya laporan <i>agent of change</i> di lingkungan Deputi Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	
2.	Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen		Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen	Tersusunnya laporan <i>agent of change</i> di lingkungan Deputi Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B06, B12
3.	Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan		Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan instansinya	a. Tersusunnya dan diterbitkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2020 – 2024 b. Instruksi Deputi Sistem Nasional tentang Rencana Aksi ZI di lingkungan Deputi Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional c. Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional d. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03, B06, B09, B12

e. Laporan . . .

1	2	3	4	5	6
				e. Laporan Tindak Lanjut atas Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	
4.	Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari		Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari	Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Penunjukan <i>Role Model</i> Pengembangan Budaya Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
5.	Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya	Ketua Pok Program B Deregulasi Kebijakan	Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya	Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
6.	Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja		Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi	a. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Standar Prosedur Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional c. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03

7. Penyesuaian . . .

1	2	3	4	5	6
7.	Penyesuaian organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan.	Ketua Program Penataan Organisasi Pok C dan	Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah telah dilakukan penyesuaian organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan	a. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
8.	Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan	Ketua Program Penataan Laksana Pok D Tata	Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan dilakukan dengan melihat apakah telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan	Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
9.	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien		Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien	Aplikasi pelayanan publik Wantannas telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial)	B03, B06, B09, B12
10.	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien		Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien	Aplikasi pelayanan publik Wantannas telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial)	B03, B06, B09, B12
11.	Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal		Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal	Penggunaan berbagai aplikasi digital di tiap - tiap unit kerja telah mampu memberikan kemudahan, kecepatan, dan nilai manfaat sehingga memberikan dampak positif untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal	B03, B06, B09, B12

12. Transformasi . . .

1	2	3	4	5	6
12.	Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal		Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal	Aplikasi internal khususnya dibidang administrasi pemerintahan telah mampu membantu dan mendorong tata kelola organisasi menjadi lebih mudah dan cepat serta menjaga prinsip - prinsip akuntabilitas, transparansi, efektif dan efisien. Aplikasi internal tersebut adalah aplikasi SANRICE, Aplikasi SIMDOKJI (Sistem Informasi Dokumen Kajian), SIDIK, SRIKANDI, E-KINERJA ASN, Kesekretariatan Online	B03, B06, B09, B12
13.	Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal		Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal	Portal Setjen Wantannas secara berkala telah mempublikasikan kepada publik tentang program kerja, kegiatan, dan capaian yang perlu diketahui oleh publik untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, simpul informasi Setjen Wantannas lainnya khususnya di media sosial (Instagram, youtube, facebook, website) cukup responsif dalam menyampaikan informasi yang aktual kepada publik	B03, B06, B09, B12
14.	Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya	Ketua Pok Program E Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya	Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya	B03, B06, B09, B12
15.	Hasil assessment telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai		Diukur dengan melihat apakah hasil <i>assessment</i> telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai	Seluruh hasil assessment dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai	B03, B06, B09, B12

1	2	3	4	5	6
16.	Penurunan pelanggaran disiplin pegawai		Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah terjadi penurunan pelanggaran disiplin pegawai	Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran tahun ini kemudian dibagi dengan Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya	B03, B06, B09, B12
17.	Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien	Ketua Pok F Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien	Tersusunnya dokumen rencana kerja tahun 2021	B03, B06, B09, B12
			Perhitungan jumlah program/kegiatan yang ada	Tersusunnya dokumen rencana kerja tahun 2021	B03, B06, B09, B12
			Perhitungan jumlah program/kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi	Tersusunnya dokumen rencana kerja tahun 2021	B03, B06, B09, B12
			Persentase sasaran dengan capaian 100% atau lebih	Tersusunnya dokumen LAKIP tahun 2020	B03, B06, B09, B12
			Persentase Anggaran yang berhasil difocussing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi	Tersusunnya dokumen LAKIP tahun 2020	B03, B06, B09, B12
18.	Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran		Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran	Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat monitoring kinerja sehingga menghasilkan efektifitas dan efisiensi penganggaran	B03, B06, B09, B12
19.	Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian <i>reward and punishment</i> oleh unit kerja		Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah hasil capaian/monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian <i>reward and punishment</i> bagi organisasi	Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) merupakan unsur dalam pemberian <i>reward and punishment</i>	B03, B06, B09, B12

20. Terdapat . . .

1	2	3	4	5	6
20.	Terdapat Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai		Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah terdapat peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai	Peta strategis (Kerangka Logis) ada dan mengacu pada kinerja utama organisasi dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai	B03, B06, B09, B12
21.	Persentase penyampaian LHKPN	Ketua Pok Program Penguatan Pengawasan G	Persentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan	B03, B06, B09, B12
			Jumlah yang harus melaporkan	Persentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	B03, B06, B09, B12
			Jumlah yang sudah melaporkan	Persentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	B03, B06, B09, B12
22.	Persentase penyampaian LHKASN		Persentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan	B03, B06, B09, B12
			Jumlah yang harus melaporkan	Persentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	B03, B06, B09, B12
			Jumlah yang sudah melaporkan	Persentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	B03, B06, B09, B12
23.	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat		Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat persentase penanganan pengaduan masyarakat	Realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan	B03, B06, B09, B12
24.	Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada Kesesuaian Persyaratan, Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, Kecepatan Waktu Penyelesaian, Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis, Kualitas Produk Spesifikasi	Ketua Pok Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik H	Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada Kesesuaian Persyaratan, Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, Kecepatan Waktu Penyelesaian, Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis, Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana/Web, Perilaku Pelaksana/Web,	Presentase upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik	B03, B06, B09, B12

Jenis . . .

1	2	3	4	5	6
	Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana/Web, Perilaku Pelaksana/Web, Kualitas Sarana dan prasarana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan		Kualitas Sarana dan prasarana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan		
25.	Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah Waktu lebih cepat, Alur lebih pendek/singkat, Terintegrasi dengan aplikasi		Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah Waktu lebih cepat, Alur lebih pendek/singkat, Terintegrasi dengan aplikasi	Presentase upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah	B03, B06, B09, B12
26.	Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab		penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsif dan bertanggung jawab	Jumlah penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi dilakukan melalui berbagai kanal/media secara <i>responsive</i> dan bertanggung jawab	B03, B06, B09, B12

DEPUTI SISTEM NASIONAL  
SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,



*[Signature]*  
MOH. HATTA USMAR RUKKA

LAMPIRAN II  
 INSTRUKSI DEPUTI SISTEM NASIONAL  
 NOMOR 1 TAHUN 2021  
 TENTANG AKSI REFORMASI BIROKRASI DEPUTI SISTEM  
 NASIONAL SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN  
 NASIONAL TAHUN 2021 DAN TINDAK LANJUT HASIL  
 EVALUASI TAHUN 2020

**TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
 DEPUTI SISTEM NASIONAL SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2020**

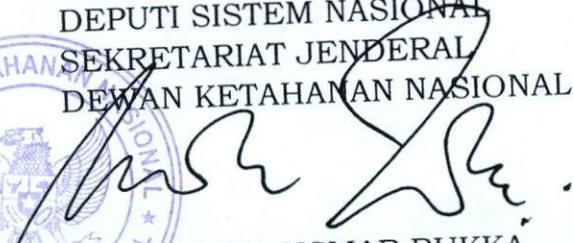
NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEBERHASILAN	TARGET	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Melakukan penguatan dan penajaman program reformasi birokrasi pada tingkat Pusat dan Unit Kerja	Ketua Pok Program A Manajemen Perubahan	Program – program yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Setjen Wantannas serta rencana kerja pada level unit kerja agar fokus pada upaya – upaya konkret yang akan dilakukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel, efisien dan efektif, serta pelayanan publik yang prima	a. Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional c. Laporan Tindak Lanjut atas Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03, B06, B09, B12
2.	Memaksimalkan peran agen perubahan		Memaksimalkan peran agen perubahan agar dirasakan nyata dampaknya, khususnya pada tingkat unit kerja sehingga memberikan kontribusi menjadikan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional semakin kuasa dan memenuhi harapan <i>stakeholder</i>	a. Pelatihan <i>agent of change</i> Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Aksi Agen Perubahan	B06, B12

3. Melakukan . . .

1	2	3	4	5	6
3.	Melakukan evaluasi peta proses bisnis secara berkala	Ketua Pok Program D Penataan Tata Laksana	Melakukan evaluasi peta proses bisnis secara berkala untuk memastikan pencapaian kinerja dapat berjalan secara optimal	Laporan monitoring dan evaluasi peta proses bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
4.	Menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai (HCDP)	Ketua Pok Program E Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai (HCDP)	Menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai (HCDP)	B12
5.	Menyempurnakan ukuran kinerja organisasi sampai dengan individu	Ketua Pok Program F Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Menyempurnakan ukuran kinerja organisasi sampai dengan individu sehingga lebih berorientasi hasil. Selanjutnya melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja tersebut dan menggunakan hasilnya sebagai dasar dalam memberikan apresiasi/penghargaan ataupun <i>punishment</i> bagi pegawai	Seluruh hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya	B12
6.	Memperkuat implementasi kebijakan pengawasan internal	Ketua Pok Program G Penguatan Pengawasan	Memperkuat implementasi kebijakan pengawasan internal, terutama pada penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, <i>whistle blowing system</i> , penanganan benturan kepentingan dan peningkatan kapabilitas APIP	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, <i>whistle blowing system</i> , penanganan benturan kepentingan dan peningkatan kapabilitas APIP	B12

7. Meningkatkan . . .

1	2	3	4	5	6
7.	Meningkatkan pembangunan Zona Integritas pada seluruh unit kerja yang strategis		Meningkatkan pembangunan Zona Integritas pada seluruh unit kerja yang strategis sehingga dapat menjadi pemicu percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	Meningkatkan pembangunan Zona Integritas pada seluruh unit kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12

DEPUTI SISTEM NASIONAL  
SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,  
  
MOH. HATTA USMAR RUKKA

